

ECONOMIC OVERHEATING

ISWARDONO SARDJONO PERMONO

Universitas Gadjah Mada

Abstraction

"Common causes of overheating directly traceable to cooling systems, are clogging or improper circulation of cooling air. Another cause of overheating is operations or excessive engine idling under extreme conditions of heat or altitude"

(Lorry Johnson, Fix your V8/fcauogen, the Good heart-MBcox Co, Ins 1983 pp. 239)

Generally the term overheating is associated with car or motorised engines which have an excess of heat. In this case overheating is not about warming-up cars, since warming-up is done to keep a car working properly. Therefore overheating can be inferred as a problem to car engines as a result of malfunction in the circulation of cooling air, which is signalled by excess engine head, over the warning line limit. This paper attempt to discuss "overheating" as a phenomenon in economics term.

Latar Belakang

Secara umum istilah "overheating" dikenal berkaitan dengan panasnya mesin mobil/motor yang berlebihan atau bahkan terlalu panas. Jadi bukan merupakan pemanasan mesin. Karena pemanasan mesin diartikan sebagai "warming-up" agar mobil tetap dapat jalan baik dan benar.

Dengan demikian "overheating" merupakan "trouble" atau masalah berkaitan dengan mesin mobil yang disebabkan karena terjadinya ketidakberesan dalam sirkulasi pendingin udara yang ditandai dengan panas mesin yang berlebihan (melebihi garis merah bahkan sudah mentok).

Secara khusus dalam khasanah ekonomi "overheating" meskipun bukan merupakan konsep yang cukup baku dan standar dalam artian teoritis mengenai

hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan inflasi atau defisit neraca transaksi berjalan (Proposal Kajian Ekonomi Indonesia)

Permasalahan

Dalam makalah ini yang menjadi permasalahan adalah:

- (1) apa yang menyebabkan terjadinya "overheating"?(Mengapa "overheating" terjadi ?)
- (2) Bagaimana mekanisme terjadinya "overheating" ?
- (3) Dampak apa saja yang ditimbulkannya?
- (4) Bagaimana mengatasi "overheating" tersebut ?

Pembahasan

Sebenarnya yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah "overheating" itu merupakan gejala / fenomenas atau masalah. Artinya kalau merupakan gejala berarti ada masalah yang lebih "urgent" untuk dipecahkan. Apalagi dengan pengertian teknik bahwa "overheating" itu merupakan gejala terjadinya masalah pada system pendingin mesin. Maka "overheating" perekonomian kalau merupakan gejala dari suatu masalah ekonomi maka perlu ditelusuri apa masalah yang Sebenarnya terjadi sehingga terjadi inflasi yang tinggi, defisit transaksi berjalan tetapi pertumbuhan ekonomi tinggi.

Sedangkan kalau "overheating" ekonomi dianggap masalah maka perlu dibuat kriteria terlebih dahulu berkaitan dengan "overheating" itu sendiri. Kapan perekonomian dikatakan overheating. Artinya pada laju inflasi berapa persen, defisit transaksi berjalan sejumlah berapa dan pertumbuhan ekonomi berapa yang menyebabkan "overheating" terjadi?.

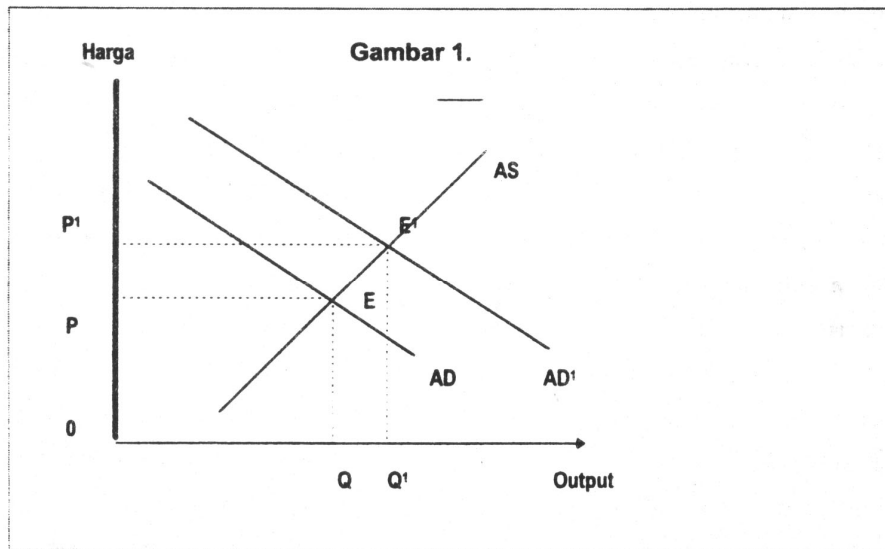
Bukti empiris yang memerlukan teori?

Sebagaimana kurva Phillips, "overheating" ini merupakan bukti empiris yang memerlukan teori untuk menjelaskan, kenapa gejala/phenomena tersebut terjadi. Gejala yang ditandai dengan inflasi yang relatif tinggi, defisit neraca transaksi

berjalan yang kronis dan disertai pertumbuhan yang relatif tinggi memerlukan pengamatan yang lebih teliti dan rinci apa sebenarnya yang menjadi sebab utama. Dengan perkataan lain penyakit apa yang sebenarnya terjadi. Apakah pertumbuhan yang tinggi menyebabkan inflasi dan defisit transaksi berjalan?

Logika dasarnya adalah sebagai berikut:

Kenaikan output (pertumbuhan ekonomi) akan mempengaruhi kenaikan permintaan agregat (A.D) dengan asumsi penawaran agregat tetap (A.S) maka akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang dan jasa (inflasi) dan adanya kenaikan / pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi permintaan untuk barang-barang & jasa impor yang dengan asumsi eksportnya tetap maka akan menyebabkan defisit pada transaksi berjalan. Kalau digambarkan sebagaimana gambar (1) berikut:



Perubahan permintaan agregat ditunjukkan oleh bergesernya kurva dari AD AD¹ yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga dari P-P¹ yang disertai dengan kenaikan output sebesar Q-Q¹ (Samuelson & Nordhaus, 1995, pp.396)

Sedangkan kalau dicermati lebih lanjut kenapa penawaran agregat relatif tetap atau dianggap tetap?. Perlu ditelaah lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat tersebut yaitu (Samuelson & Nordhaus 1995, Pp 544-545)

- (1) Output potensial yaitu kemampuan (produktif) untuk menghasilkan output dalam perekonomian atau jumlah maksimum yang dapat dihasilkan dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas harga. Dalam hal ini ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu input-input yang digunakan dan teknologi serta efisiensi penggunaannya. Adanya inovasi dan perbaikan teknologi diharapkan akan meningkatkan output potensial.
- (2) Input Cost, atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli input yang digunakan. Dalam hal ini, misalnya upah, harga barang-barang jasa serta input impor dan biaya input lainnya. Adanya tingkat upah yang rendah atau menyebabkan penurunan ongkos produksi sehingga dengan anggapan output potensial tertentu maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Demikian sebaliknya akan terjadi penurunan penawaran jika tingkat upah meningkat. Penurunan harga impor akan menurunkan biaya produksi (dianggap menggunakan input impor) dan akhirnya menaikkan penawaran agregat. Sebaliknya akan terjadi penurunan penawaran jika harga impor naik. Biaya input lain misalnya untuk bahan bakar minyak, jika terjadi penurunan harga bahan bakar minyak akan menyebabkan biaya produksi turun dan akhirnya penawaran agregat meningkat. Akan tetapi jika harga bahan bakar minyak meningkat maka akan menyebabkan peningkatan biaya produksi yang akhirnya akan mengurangi penawaran. Pernah terjadi ditahun 1970-an dimana negara-negara industri khususnya dikejutkan dengan adanya penyakit ekonomi makro yang disebut "goncangan penawaran" atau "supply shock" yaitu terjadi perubahan yang mendadak pada biaya produksi yang akan menggeser kurva penawaran agregat ke kiri (berkurang).

Kejadian di tahun 1973 tepatnya ini disebut oleh Samuelson & Nordhaus (1995) sebagai "the year of the seven plagues" dimana ditandai dengan kegagalan panen, pergeseran gelombang lautan, spekulasi dipasaran dunia, kekacauan dalam pasar valuta asing, peningkatan empat kali harga minyak mentah. Adanya kegoncangan penawaran menyebabkan tidak tercapainya tujuan ekonomi makro pada umumnya: pertumbuhan, stabilitas dan distribusi pendapatan.

Dasar teori dan bukti empiris di atas apakah dapat dianalogikan untuk menjelaskan terjadi "overheating" di Indonesia dan negara yang sedang berkembang?.

Pengalaman yang dimiliki Indonesia berkaitan dengan situasi "*overheating Economy*" adalah sebagai berikut:

1. Sejak paket deregulasi 1988, terjadi ekspansi moneter yang cukup besar di tahun 1989, dimana M1 dan M2 meningkat sebesar 31,7 persen dan 34,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 13,5 persen dan 23,9 persen. Multiplier untuk uang sempit (M_1/RM) dan multiplier uang longgar (M_2/RM) juga meningkat dari 1,4 dan 4,38 di bulan Oktober 1988 menjadi 1,88 dan 5,61 pada akhir Desember 1989.

Sementara itu laju inflasi di tahun 1988 dan 1989 mencapai 5,47 persen dan 5,97 persen. Ini berarti bahwa tidak ada dampak langsung meningkatnya JUB di atas dengan laju inflasi. Hal ini disinyalir disebabkan masih adanya kapasitas produksi yang menganggur dan adanya kesenjangan waktu (time Lag) yang diperlukan untuk menyesuaikan kenaikan JUB tersebut (BINHADI, 1995). Adanya kenaikan JUB yang cukup berarti ditahun 1989 dan awal 1990 bersama-sama dengan adanya inflasi "*cost-push*" yang disebabkan karena meningkatnya harga BBM dalam negeri mengakibatkan peningkatan laju inflasi ditahun 1990 mencapai 9,14 persen (dalam 10 bulan).

2. Menghadapi perkembangan tersebut, ditahun 1990 Bank Sentral memberlakukan kebijakan uang ketat yang dikendalikan melalui :

- a. Operasi Pasar Terbuka dengan cara menawarkan SBI secara bersinambungan melalui pelelangan.
- b. Peningkatan secara gradual tingkat diskonto SBI dari 10 persen menjadi 16,25 persen untuk SBI-7 hari, sedangkan untuk SBI-1 bulan meningkat dari 13,13 persen menjadi 18,25 persen dan untuk SBI-3 bulan meningkat dari 13,94 persen menjadi 19,25 persen serta untuk SBI-6 bulan meningkat dari 15,5 persen menjadi 20,0 persen di akhir Oktober 1990
- c. Pencairan kredit likuiditas pada saat jatuh tempo ini sesuai dengan paket kebijakan Januari 1990 dan
- d. Kenaikan fasilitas diskonto dari 16 persen pada akhir April 1990 menjadi 19 persen di bulan Agustus.

Dampak dari kebijakan diatas adalah bahwa Bank Indonesia mengalami surplus dalam sisi pembelian atas valuta asing (spot & Swap). Suku bunga deposito berjangka meningkat semuanya, dimana untuk deposito berjangka 3 bulan di bank-bank pemerintah meningkat dari 14,5 persen di bulan Mei 1990 menjadi 20,25 persen di bulan Oktober 1990.

3. Usaha pemerintah dalam menghadapi " *Over heated economy* khususnya pada peningkatan harga dan cepatnya pertumbuhan impor di tahun 1991 dengan jalan melanjutkan kebijakan uang ketat yang sudah dimulai sejak pertengahan 1990. Kebijakan tersebut diperkuat dengan pengendalian keuangan pemerintah yang ditunjukkan dengan perkembangan anggaran cadangan yang mantap yang dapat membantu menetralsir ekspansi likuiditas dari meningkatnya penerimaan minyak pada tahun anggaran 1990/1991. Sejalan dengan kebijakan uang ketat tersebut rentu untuk mengurangi spekulasi dalam valuta asing, pemerintah di bulan Februari 1990 atas perintah menteri Keuangan menganjurkan pada 12 (dua belas) BUMN untuk mencairkan dananya dari Bank-bank pemerintah dan Bank swasta untuk dibelikan SBI dari Bank Indonesia {Gebrakan Sumarlin). Untuk menghindari kontraksi moneter yang berlebihan, pada waktu yang sama Bank Indonesia membeli SBPU sekitar 75 persen dari SBI yang terjual.

Kebijakan moneter yang hati-hati di atas dapat meredam pertumbuhan JUB, dimana kenaikan tahunan M1 di tahun 1991 turun drastis dari 18,4 persen menjadi 10,6 persen, sedangkan M2 meningkat hanya 17,1 persen di bandingkan tahun sebelumnya 44,2 persen. Menurunnya pertumbuhan baik M1 maupun M2 banyak disebabkan karena menurunnya kredit perbankan, dimana pada tahun 1991 kredit bank hanya meningkat sebesar 16,8 persen, ini merupakan penurunan yang sangat besar jika dibandingkan pertumbuhan kredit bank di tahun 1990 mencapai 53,6 persen. Laju inflasi meningkat khususnya di bulan April, Juli dan Agustus 1991 dimana laju inflasi sampai dengan bulan Agustus mencapai 7,40 persen dan di akhir tahun mencapai 9,52 persen. Kenaikan laju inflasi ini banyak dipengaruhi oleh dampak musiman di bulan April, kenaikan harga BBM di bulan Mei 1991 serta peningkatan tarif listrik dan sarana transportasi. Secara ringkas adanya kebijakan moneter khususnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL. Inflasi, GDP, Kredit dan JUB
Indonesia 1988 - 1995 (dalam %)**

Tahun	Kredit	M1	M2	Inflasi	GDP
1988	33,9	13,5	22,9	5,47	5,8
1989	44,6	39,8	39,8	5,97	7,5
1990	53,6	18,4	44,2	9,53	7,2
1991	16,3	10,6	17,0	9,52	6,9
1992	8,9	9,3	20,2	4,94	6,4
1993	22,3	28,7	22,3	9,77	6,7
1994	25,7	23,2	19,7	9,24	7,6
1995	18,7*	10,4*	21,1*	9,0	7,1

Catatan : *) data sampai bulan Oktober 1995.

Sumber : Bank Indonesia, *Indonesian Financial Statistics*, berbagai tahun penerbitan.

Menurut Soedradjat Djiwandono (Gatra 1996) tekanan terhadap transaksi berjalan masih akan terasa sampai tahun depan dan meskipun kapasitas produksi meningkat dan ekonomi dunia membaik, ekspor non migas Indonesia tidak akan meningkat tajam. Hal ini disebabkan adanya saingan dari Cina, Vietnam dan India.

Sedangkan menurut Mar'ie Mohammad (Gatra 1996), defisit neraca berjalan Indonesia sudah "lampu kuning" dimana pada semester pertama 1996/97 mencapai US \$ 4,6 milyar yang berarti naik sebesar 24% dari kondisi semester pertama tahun 1995/96. Dan defisit untuk seluruh tahun anggaran 1996/97 diperkirakan mencapai US \$ 8,9 milyar. Defisit transaksi berjalan sebagai bagian dari PDB akan mencapai 4%. Dua tahun sebelumnya, defisit ini hanya 2-3% dari PDB. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus lebih serius dalam meningkatkan ekspor dan mengawasi pertumbuhan impor dengan ketat karena akhir-akhir ini meningkat dengan cepat. Karena bahan ekspor utama Indonesia seperti tekstil dan kayu tidak lagi dapat diandalkan, ekspor non migas lain seperti sepatu dan elektronika jumlahnya belum memadai.

Masalah yang utama dalam defisit transaksi berjalan ini adalah defisit yang terjadi pada neraca jasa, dimana pada moneter pertama tahun ini berjumlah US \$ 617 milyar dan diperkirakan akan mencapai US \$ 14 milyar sampai akhir tahun. Masalah lainnya adalah besarnya suku bunga yang dibayar oleh pengusaha swasta Indonesia dari pinjaman luar negeri cukup tinggi.

Dan masih terjadinya ekspansi moneter yang walau semakin terkendali dan diharapkan akan terjadi gejala kontraksi maka tinginya defisit transaksi berjalan dan investasi di bidang infrastruktur yang masih tinggi menunjukkan masih beratnya usaha pemerintah untuk mendinginkan perekonomian. Namun bukan berarti seluruh sektor masih panas.

Kesimpulan

Dengan demikian dari pengamatan sementara dapat disimpulkan bahwa "overheating" perekonomian merupakan gejala dari penyakit ekonomi makro yang lebih berbahaya yaitu dikhawatirkan akan terjadi "Supply Shock" yang disebabkan karena meningkatnya biaya-biaya produksi yang ditanggung pengusaha.

Dengan perkataan lain bahwa "overheating" bukan penyakit ekonomi makro. Karena kalau dikategorikan sebagai penyakit harus ada kriteria yang jelas berapa

persenkah tingginya laju inflasi, berapa persenkah pertumbuhan serta berapa besarnya defisit neraca transaksi berjalan yang akan menjamin atau menyebabkan terjadinya "overheating". Dan "overheating" bukannya suatu teori tetapi merupakan bukti empiris yang memerlukan dasar teori untuk menjelaskan sebagaimana Kurva Phillips.

DAFTAR PUSTAKA

1. Larry Johnson, *Fix Your Volkswagen*, The Goodheart - Willcoox Co, Inc, South Holland, Illinois, 1983.
2. P.A. Samuelson & W.D. Nordhaus, *Economics*, 13th Edition, McGraw Hill Inc, 1995
3. Majalah Berita Mingguan, GATRA, No. 4, Tahun III, 14 Desember 1996.
4. Binhadi, *Financial Sector Deregulation Banking Development and Monetary Policy, The Indonesian Experience*, Jakarta, JBI, 1995